Transformasi Pola Bertani pada Masyarakat Transmigrasi di Kabupaten Keerom

Apner Krei[1*], Sonya Martha Kawer[1]
[1]Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Indonesia
Corresponding Author's e-mail: krei.apner@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat
Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 5316 - 5330

Available at:
https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4449

DOI:
https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4449

Article History:
Received: 23-09-2026
Revised: 31-10-2026
Accepted: 31-10-2026

Abstract *: This article examines how farming patterns changed among transmigrant communities in Arso and Skanto Districts, Keerom Regency, Papua, an area settled from 1983 through food-crop transmigration and oil palm Nucleus Estate Smallholder (PIR) schemes. It uses a qualitative descriptive design: seven purposively selected informants (transmigrants, Indigenous Papuan farmers, and village officials) were interviewed in July 2026, together with one group interview with Papuan PIR farmers, alongside observation, photographs, and documents. Data were coded deductively with a six-dimension framework derived from agrarian political economy and the sustainable livelihoods approach, and inductively for emerging themes. Three overlapping phases were identified: food crops, oil palm dominance, and diversification into food, horticultural, and smallholder tree crops after palm yields declined. Ageing palms, unfinished replanting, and palm prices acted as structural pressures, while household needs, roads, and local buyers shaped the response. The trajectory is non-linear and layered rather than a return to the starting point. Papuan farmers took part as PIR smallholders, while customary landholders' compensation claims remain unresolved. Findings are exploratory and bounded by the small sample.*

Keywords *: agrarian change; transmigration; oil palm; livelihoods; Papua*

Abstrak : Artikel ini mengkaji perubahan pola bertani masyarakat transmigrasi di Distrik Arso dan Skanto, Kabupaten Keerom, Papua, kawasan yang dihuni sejak 1983 melalui transmigrasi tanaman pangan dan Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kelapa sawit. Penelitian memakai desain kualitatif deskriptif: tujuh informan purposif (transmigran, petani Orang Asli Papua, dan aparat kampung) diwawancarai pada Juli 2026, ditambah satu wawancara kelompok petani Papua peserta PIR, dilengkapi observasi, foto, dan dokumen. Data dikodekan secara deduktif dengan kerangka enam dimensi yang diturunkan dari ekonomi politik agraria dan pendekatan penghidupan berkelanjutan, serta secara induktif untuk tema yang muncul. Ditemukan tiga fase yang saling tumpang tindih: tanaman pangan, dominasi sawit, dan diversifikasi ke palawija, hortikultura, dan tanaman tahunan rakyat setelah hasil sawit menurun. Penuaan tanaman, peremajaan yang belum tuntas, dan harga sawit bekerja sebagai tekanan struktural, sedangkan kebutuhan rumah tangga, jalan, dan pembeli lokal membentuk respons petani. Lintasannya non-linier dan berlapis, bukan kembali ke titik awal. Petani Papua terlibat sebagai peserta plasma PIR, sementara tuntutan kompensasi pemilik hak ulayat belum selesai. Temuan bersifat eksploratif dan terbatas oleh jumlah informan.

Kata Kunci : perubahan agraria; transmigrasi; kelapa sawit; strategi nafkah; Papua

PENDAHULUAN

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan kependudukan dan pembangunan yang paling berpengaruh dalam membentuk pertanian di kawasan timur Indonesia. Melalui program ini negara memindahkan penduduk dari wilayah padat sekaligus membangun kawasan produksi pertanian baru lengkap dengan permukiman, lahan usaha, dan kelembagaannya (Legiani dkk.,

2018; Tulis dkk., 2025). Sejak Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986, transmigrasi juga dikaitkan dengan pengembangan perkebunan pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR-Trans), sehingga transmigran menjadi motor perluasan sawit rakyat (Widyatmoko & Dewi, 2019). Di Papua, salah satu kawasan penempatan terpenting berada di Arso dan Skanto, yang sejak 2002 menjadi bagian Kabupaten Keerom (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002).

Pembangunan kawasan sawit Arso bermula dari penugasan PTPN II oleh Menteri Pertanian pada 1980 dan pelepasan tanah adat seluas 50.000 hektare yang ditandatangani tokoh adat pada 19 Oktober 1982 (Mongabay Indonesia, 2018). Lokasi perkebunan ditetapkan melalui Surat Gubernur Irian Jaya Nomor 143/GIJ/1983, dan transmigrasi di Arso dan Skanto dimulai pada 1983 dengan areal PIR sekitar 10.545 hektare di Arso dan 5.951 hektare di Skanto (Sanggenafa, 2020, dalam Siriwa dkk., 2024). Setiap keluarga peserta PIR menerima pekarangan 0,25 hektare, lahan pangan 0,75 hektare, dan kebun sawit 2 hektare (Mongabay Indonesia, 2018). Kabupaten Keerom kini berpenduduk sekitar 70,8 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom, 2025). Setelah lebih dari tiga dekade, kebun plasma menua, program PIR di Arso menghadapi biaya perawatan tinggi, harga yang berfluktuasi, dan keterbatasan fasilitas pengolahan (Isnaini dkk., 2025), sementara peremajaan sawit rakyat baru dirintis menjelang akhir dekade 2010-an (Mongabay Indonesia, 2021).

Perubahan pola bertani di kawasan semacam ini tidak memadai dibaca sebagai pergantian komoditas. Literatur ekonomi politik agraria menegaskan bahwa perubahan pertanian menyangkut siapa menguasai apa, siapa mengerjakan apa, siapa memperoleh apa, dan untuk apa hasilnya dipakai (Bernstein, 2010). Kajian sawit di Sumatra dan Kalimantan memperlihatkan bahwa hasil keterlibatan petani kecil sangat bergantung pada syarat-syarat keterlibatannya (McCarthy, 2010) dan dapat melahirkan diferensiasi kelas di antara petani itu sendiri (Habibi, 2023). Pendekatan penghidupan berkelanjutan menambahkan bahwa rumah tangga menata ulang aset dan strategi nafkahnya di dalam konteks kerentanan dan proses kelembagaan tertentu (Scoones, 1998). Pada saat yang sama, kajian transisi agraria di Asia Tenggara menunjukkan bahwa perubahan pertanian jarang berjalan satu arah dari subsisten ke komersial lalu ke nonpertanian; petani kecil bertahan, memadukan usaha tani dengan kerja lain, dan berpindah strategi ketika harga atau iklim berubah (Rigg dkk., 2016; Nguyen dkk., 2020; Kühling dkk., 2022).

Kajian tentang Keerom sejauh ini memusatkan perhatian pada implementasi PIR (Isnaini dkk., 2025), ekonomi masyarakat adat di wilayah sawit (Siriwa dkk., 2024), dan ekologi usaha tani petani asli Papua (Turua dkk., 2014). Belum ada kajian yang menelusuri perubahan pola bertani transmigran lintas fase dan menautkannya dengan perubahan pada masyarakat adat di sekitarnya. Artikel ini mengisi celah tersebut dengan menjawab tiga pertanyaan penelitian (PP). PP1: bagaimana pola bertani masyarakat transmigrasi di Distrik Arso dan Skanto berubah sejak dekade 1980-an hingga 2026, dilihat dari fase perkembangan dan enam dimensi pola bertani? PP2: faktor apa yang mendorong perubahan itu, dan bagaimana kedudukan relatifnya? PP3: bagaimana perubahan tersebut memengaruhi strategi nafkah masyarakat transmigrasi dan relasinya dengan masyarakat adat Papua? Kontribusi yang ditawarkan bersifat terbatas: sebuah kerangka analisis enam dimensi yang dioperasionalkan dari literatur dan diuji secara eksploratif pada satu kawasan, serta bukti kualitatif awal tentang lintasan perubahan yang tidak linier.

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka analisis disusun dengan menurunkan dimensi pola bertani dari dua sumber teoretis. Dari ekonomi politik agraria (Bernstein, 2010) diturunkan empat pertanyaan pokok yang dioperasionalkan menjadi dimensi lahan dan penguasaan (siapa menguasai apa), tenaga kerja dan organisasi produksi (siapa mengerjakan apa), serta pemasaran dan rantai nilai (siapa memperoleh apa dan bagaimana surplus dipakai). Dari pendekatan penghidupan berkelanjutan (Scoones, 1998) diambil gagasan bahwa strategi nafkah dibentuk oleh aset, konteks kerentanan, dan proses kelembagaan, yang dioperasionalkan menjadi dimensi kelembagaan dan relasi sosial. Dua dimensi lain bersifat agronomis tetapi tetap sosial: komoditas dan orientasi produksi, yang menandai derajat keterlibatan dalam pasar dan syarat-syarat keterlibatan tersebut (McCarthy, 2010), serta teknologi dan input, yang dipahami sebagai proses difusi dan pembelajaran sosial antarpetani (Rogers, 2003; Pratiwi dkk., 2022). Tabel 1 merinci definisi operasional dan indikator setiap dimensi.

Tabel 1. Kerangka Enam Dimensi Pola Bertani

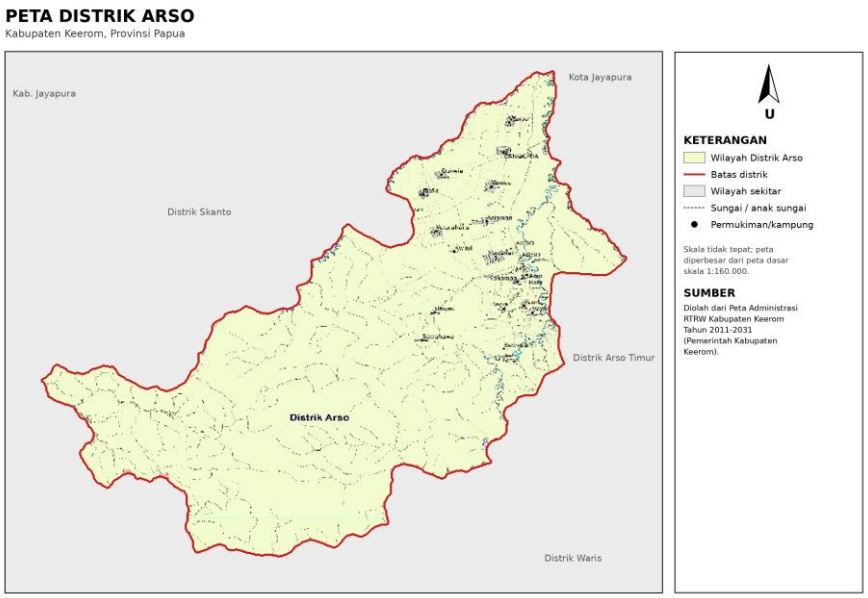
Dimensi	Definisi operasional	Indikator yang ditelusuri	Rujukan konseptual
Lahan dan penguasaan	Cara lahan diperoleh, dikuasai, dan dimaknai rumah tangga	Asal lahan, status (jatah, plasma, hak milik, garapan), luas, fungsi lahan	Bernstein (2010)
Komoditas dan orientasi produksi	Jenis tanaman dan tujuan produksi	Komoditas utama, porsi konsumsi dan jual, keterikatan pada pembeli tertentu	McCarthy (2010)
Teknologi dan input	Teknik budidaya, alat, dan sarana produksi beserta cara mempelajarinya	Alat, pupuk, benih, pestisida, sumber pengetahuan	Rogers (2003); Pratiwi dkk. (2022)
Tenaga kerja dan organisasi produksi	Siapa mengerjakan kebun dan bagaimana kerja diatur	Tenaga keluarga, upahan, gotong royong, kerja di luar usaha tani	Bernstein (2010); Habibi (2023)
Pemasaran dan rantai nilai	Jalur hasil panen sampai pembeli dan pembagian nilainya	Pembeli, harga, sarana angkut, informasi pasar	Bernstein (2010)
Kelembagaan dan relasi sosial	Aturan, organisasi, dan relasi yang mengatur produksi	Inti-plasma, kelompok tani, penyuluh, aturan adat, relasi antarkelompok	Scoones (1998)

Sumber: Disusun penulis dari rujukan yang dicantumkan

Untuk menghindari klaim yang tidak teruji, artikel ini memakai istilah lintasan non-linier dan berlapis dengan definisi operasional berikut. Lintasan disebut non-linier bila arah perubahan pada sedikitnya satu dimensi berbalik atau bercabang, misalnya dari tanaman tahunan kembali ke tanaman semusim, alih-alih bergerak satu arah. Lintasan disebut berlapis bila unsur dari fase terdahulu, seperti status lahan plasma, tanaman sawit tua, atau kelembagaan bentukan program, tetap hadir dan membentuk fase berikutnya, sehingga fase baru bukan pengulangan fase awal. Dengan definisi ini, kembalinya tanaman semusim tidak otomatis dibaca sebagai siklus.

METODE PENELITIAN

Penelitian memakai desain kualitatif deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu menggambarkan perubahan pola bertani dan faktor yang menyertainya menurut pengalaman pelaku, tanpa dimaksudkan menghasilkan generalisasi statistik. Lokasi penelitian adalah Distrik Arso dan Distrik Skanto, mencakup kawasan PIR I di Arso serta Kampung Skanto dan Arsopura di Skanto (Gambar 1). Pengumpulan data lapangan berlangsung pada 11-31 Juli 2026.



(a) Distrik Arso



(b) Distrik Skanto

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian: (a) Distrik Arso dan (b) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom
Sumber: Diolah dari Peta Administrasi RTRW Kabupaten Keerom Tahun 2011-2031

Informan dipilih secara purposif dengan kriteria pernah atau sedang mengalami perpindahan jenis usaha tani, sehingga dapat menuturkan perubahan dari pengalaman sendiri. Informan berjumlah tujuh orang (Tabel 2). Kategori disusun menurut latar kelompok dan riwayat usaha tani; jabatan sebagai aparat kampung dicatat terpisah karena kedua informan yang menjabatnya juga bertani. Selain tujuh informan, satu wawancara kelompok dengan petani Papua di PIR I (W5) melibatkan INF-02, INF-03, dan beberapa warga lain. Istilah masyarakat adat Papua dipakai untuk Orang Asli Papua pemilik hak ulayat di Arso dan Skanto, sedangkan petani Papua mencakup Orang Asli Papua yang bertani di kawasan transmigrasi, termasuk yang berasal dari luar Keerom. Identitas informan disamarkan dengan kode INF-01 sampai INF-07, dan kunci kode disimpan terpisah oleh tim.

Tabel 2. Karakteristik Informan Penelitian

Kode	Kelompok dan jalur	Lokasi	Riwayat usaha
INF-01	Transmigran asal Jawa Tengah, generasi pertama (tiba 1986), jalur PIR	PIR I, Arso	Lahan pangan, sawit plasma dan usaha mebel, kini jagung dan kacang tanah
INF-02	Petani Papua (asal Biak), tiba 1983, peserta PIR; kini aparat kampung	PIR I, Arso	Sawit plasma, kakao (gagal), kini pinang; bekerja sebagai aparat kampung

Kode	Kelompok dan jalur	Lokasi	Riwayat usaha
INF-03	Petani Papua generasi kedua keluarga peserta PIR	PIR I, Arso	Sawit plasma keluarga, kini kebun pangan dan buruh
INF-04	Aparat kampung (kepala kampung), juga petani	Skanto	Petani umum, kemudian sawit
INF-05	Transmigran lintas generasi	Arsopura, Skanto	Petani umum, pekerja swasta, sawit
INF-06	Petani Papua	Arsopura, Skanto	Kebun tradisional, pekerja swasta, petani umum
INF-07	Transmigran lintas generasi	Arsopura, Skanto	Pekerja swasta, petani umum

Sumber: Data primer, Juli 2026

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi kebun dan permukiman, dokumentasi foto, dan telaah dokumen. Wawancara berpedoman pada panduan semi-terstruktur yang berbeda untuk petani transmigran, petani Papua, dan aparat kampung; butir pertanyaannya disusun menurut empat tema (perubahan pola bertani, interaksi sosial budaya, faktor perubahan, dan dampak sosial ekonomi) dan menjangkau keenam dimensi pada Tabel 1. Wawancara dilakukan dalam bahasa Indonesia, termasuk ragam Melayu Papua. Sebelum wawancara, tujuan penelitian dijelaskan dan informan dimintai persetujuan lisan untuk direkam, dengan hak menolak menjawab. Wawancara di PIR I terekam dalam enam berkas dengan durasi total sekitar 65 menit, terdiri atas wawancara INF-01 (sekitar 33 menit), wawancara INF-02 dalam dua sesi (sekitar 16 menit), wawancara singkat INF-03, dan satu wawancara kelompok dengan petani Papua PIR I (sekitar 14 menit). Rekaman ditranskripsi dengan bantuan perangkat pengenal suara, lalu kutipan yang dipakai dicocokkan kembali dengan rekaman. Keterangan informan Skanto dan Arsopura (INF-04 sampai INF-07) bersumber dari catatan wawancara lapangan dan dipakai terutama sebagai pembanding. Dokumen yang ditelaah meliputi peta RTRW Kabupaten Keerom 2011-2031, publikasi statistik BPS Kabupaten Keerom, regulasi transmigrasi dan PIR, kajian ilmiah tentang PIR Arso, serta pemberitaan media sebagai sumber pelengkap.

Analisis mengikuti siklus interaktif kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (Miles dkk., 2020). Pada tahap kondensasi, transkrip dan catatan dikodekan dalam dua lapis. Lapis pertama bersifat deduktif, memakai keenam dimensi pada Tabel 1 dan tiga fase sebagai kode awal. Lapis kedua bersifat induktif mengikuti prosedur analisis tematik (Braun & Clarke, 2006) untuk menangkap tema yang tidak tercakup kode awal, seperti banjir, penggarapan lahan kerabat, dan tuntutan ulayat. Pada tahap penyajian, hasil kode disusun dalam tiga matriks: fase menurut dimensi (Tabel 4), faktor menurut jenis dan bukti (Tabel 5), serta aset, strategi, dan capaian nafkah menurut kelompok (Tabel 6). Hubungan kedua model analisis dengan demikian bersifat berjenjang: analisis tematik dipakai di dalam tahap kondensasi, sedangkan model interaktif Miles mengatur alur keseluruhan.

Keabsahan data dijaga dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan keterangan petani transmigran, petani Papua, dan aparat kampung tentang peristiwa yang sama, serta triangulasi teknik, yaitu mencocokkan wawancara dengan observasi, foto, dan dokumen (Creswell & Poth, 2018). Untuk menjaga proporsi klaim, artikel ini memakai tiga aturan: keterangan yang didukung sedikitnya dua sumber atau dua teknik disebut temuan; keterangan dari satu sumber disebut indikasi; dan jumlah informan disebutkan secara eksplisit sebagai pengganti kuantifier umum. Kecukupan informan dinilai dengan konsep kekuatan informasi (Malterud dkk., 2016): informan dipilih karena mengalami langsung peralihan usaha tani, sehingga keterangannya padat untuk fase sawit dan hortikultura di PIR I. Kejenuhan data (Guest dkk., 2006) belum tercapai untuk kawasan transmigrasi umum dan untuk pemilik hak ulayat, sehingga klaim tentang kedua kelompok itu dibatasi. Isu tanah dan hak ulayat disajikan sebagaimana dituturkan para pihak dan dokumen, tanpa menilai keabsahan klaim hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini disusun mengikuti tiga pertanyaan penelitian. Subbab Hasil menyajikan data lapangan dan dokumen; perbandingan dengan literatur ditempatkan pada subbab Pembahasan. Kode W5 merujuk pada wawancara kelompok dengan petani Papua di PIR I yang melibatkan INF-02, INF-03, dan warga lain.

HASIL

PP1: FASE DAN DIMENSI PERUBAHAN POLA BERTANI

Dokumen dan kajian yang ditelaah memberi kerangka waktu bagi tuturan informan; kronologinya dirangkum pada Tabel 3. Penanaman kebun plasma dimulai pada 1983, dan PTPN II membuka hutan sagu untuk sawit di Arso sejak 1984 (Turua dkk., 2014; Mongabay Indonesia, 2018). Dari 50.000 hektare yang dilepaskan, sekitar 12.010 hektare dipakai, terdiri atas 3.600 hektare plasma PIR, 5.710 hektare kebun pola KKPA, 2.506 hektare kebun inti, dan 193 hektare penggunaan lain; sekitar 1.800 keluarga tercatat sebagai petani PIR dan 2.208 keluarga sebagai petani KKPA (Mongabay Indonesia, 2018). Pada 2007–2011, produktivitas kebun plasma di Keerom mencapai puncak sekitar 11,6 ton tandan buah segar (TBS) per hektare per tahun pada 2009 (Alimuddin, 2020). Angka ini berbeda dari areal PIR 10.545 hektare di Arso yang dikutip Siriwa dkk. (2024), kemungkinan karena perbedaan cakupan dan waktu pencatatan. Perbedaan tersebut belum dapat direkonsiliasi karena arsip PTPN II dan dinas transmigrasi tidak dapat diakses dalam penelitian ini.

Tabel 3. Kronologi Pembentukan dan Perubahan Kawasan Sawit Arso–Skanto Menurut Dokumen dan Informan

Tahun	Peristiwa	Sumber
1980	Menteri Pertanian menugaskan PTPN II membangun kebun di Arso	Mongabay Indonesia (2018)
1982	Pelepasan tanah adat 50.000 ha ditandatangani (19 Oktober)	Mongabay Indonesia (2018)
1983	Surat Gubernur 143/GIJ/1983; transmigrasi Arso dan Skanto dimulai; penanaman plasma dimulai; INF-02 tiba di Arso	Siriwa dkk. (2024); Mongabay Indonesia (2018); INF-02
1984	PTPN II membuka hutan sagu untuk sawit di Arso dan Arso Timur	Turua dkk. (2014)
1986	Inpres 1/1986 tentang PIR yang dikaitkan dengan transmigrasi; INF-01 tiba, sawit sudah ditanam tetapi belum berbuah	Inpres 1/1986; INF-01
2002	Kabupaten Keerom dibentuk	UU 26/2002
2009	Produktivitas kebun plasma Keerom mencapai puncak sekitar 11,6 ton TBS/ha/tahun	Alimuddin (2020)
2011–2015	Produksi TBS dan CPO PTPN II Arso menurun	Mongabay Indonesia (2018)
Sekitar 2012	Hasil sawit rakyat mulai menurun menurut informan	Catatan lapangan
2012–2017	Pemalangan pabrik dan pemasangan plang di kebun inti oleh pemilik ulayat; Inkuiri Nasional Komnas HAM (2015)	Mongabay Indonesia (2018); Tanahkita (t.t.)
2018–2023	Program peremajaan sawit rakyat di Arso dirintis dengan hibah BPDPKS	Mongabay Indonesia (2021)
2020–2021	Pandemi COVID-19; INF-01 beralih ke jagung dan kacang tanah	INF-01
2026	Kebun plasma sebagian ditanami palawija dan tanaman tahunan rakyat; tuntutan ulayat belum selesai	Observasi; INF-02; W5

Sumber: Disusun dari dokumen dan wawancara, 2026

Kesaksian informan perlu dibedakan menurut kedudukannya terhadap peristiwa. INF-02 mengalami langsung penempatan di Arso sejak 1983, dan INF-01 tiba pada 1986, ketika kebun sawit sudah ditanam tetapi belum berbuah. INF-03 adalah generasi kedua keluarga peserta PIR dan menuturkan masa awal dari cerita keluarganya; keterangannya tentang masa itu diperlakukan sebagai tuturan turunan.

Fase pangan. Kedua informan generasi pertama menuturkan bahwa lahan pangan diserahkan lebih dahulu, sebelum sawit menghasilkan, dan bahwa rumah tangga hidup dari jatah bantuan pemerintah serta hasil lahan pangan. INF-02 mengingat bantuan berupa jatah hidup dan alat seperti cangkul, sedangkan tanaman sampingan seperti padi dan kedelai ditanam masing-masing keluarga (INF-02, wawancara, 11 Juli 2026). INF-01 menanam padi dan kacang dengan benih sendiri, dan menurutnya kebun sawit baru diserahkan kepada petani beberapa tahun setelah lahan pangan dan pekarangan disiapkan. Petani Papua dalam W5 menuturkan bahwa sebelum sawit mereka menanam singkong dan tanaman lain dengan cara kampung, dan seorang di antaranya menerima bibit kakao dari penyuluh pertanian dan menanam sekitar 600 pohon dengan jarak 2 x 3 meter, tetapi INF-02 menyebut kakaonya gagal karena hama. Data tentang hasil panen padi dan kedelai pada fase ini tidak tersedia, baik dari informan maupun dokumen yang ditelaah, sehingga keberhasilan produksi fase pangan tidak dapat dinilai. Yang dapat dinyatakan adalah fungsinya: lahan pangan menjadi penyangga hidup selama masa tunggu tanaman sawit.

Fase sawit. Keterlibatan petani Papua dalam PIR muncul jelas dalam W5. Warga Papua di PIR I menyebut diri mereka warga lokal yang ikut dalam pola transmigrasi, dengan pembagian lahan yang sama: lahan pekarangan, lahan usaha I yang hanya boleh ditanami sawit, dan lahan usaha II untuk pangan. INF-03 menyebut keluarganya sebagai turunan sawit, dan lahan plasma keluarganya kini berstatus hak milik. Masa produktif sawit diingat sebagai masa sejahtera oleh kedua kelompok. INF-01 menuturkan:

> "Waktu dulu itu paling tinggi itu 700, 800 rupiah per kilo. Kalau pas panen raya itu bisa sampai 6 ton, 7 ton … kalau waktu itu memang kita merasakan mungkin lebih daripada PNS." (INF-01, wawancara, 11 Juli 2026)

Klarifikasi dalam wawancara menunjukkan bahwa angka 6-7 ton merujuk pada hasil kebun sawit 2 hektare pada masa panen raya, yaitu masa produksi puncak. Satuan periodenya tidak dirinci informan, sehingga angka ini tidak dikonversi menjadi produksi tahunan; tahun berlakunya harga 700-800 rupiah per kilogram juga tidak disebutkan. Keduanya karena itu diperlakukan sebagai ingatan informan, bukan data produksi dan harga. Sebagai pembanding, dengan produktivitas puncak sekitar 11,6 ton per hektare per tahun (Alimuddin, 2020), kebun 2 hektare menghasilkan sekitar 23 ton TBS per tahun, sehingga angka 6-7 ton wajar dibaca sebagai hasil periode panen puncak, bukan hasil tahunan. Pembanding ini berasal dari periode 2007-2011 dan hanya menunjukkan orde besaran. Seri harga TBS resmi untuk Papua pada periode tersebut tidak ditemukan dalam dokumen yang dapat diakses. Ukuran sejahtera dalam tuturan ini juga berupa pengalaman konkret: pada masa sawit INF-01 dapat pulang ke Jawa kira-kira dua tahun sekali, sesuatu yang tidak lagi ia lakukan. Peserta W5 menyebut masa itu dengan istilah petani berdasi dan membandingkan pendapatan bulanan dari sawit dengan gaji pegawai. Perbandingan dengan pegawai negeri ini merupakan ukuran subjektif informan, bukan hasil perhitungan pendapatan.

Fase diversifikasi. Menurut keterangan informan yang dihimpun dalam catatan lapangan, hasil sawit mulai menurun sekitar 2012; dokumentasi produksi PTPN II juga menunjukkan penurunan sejak 2011 (Mongabay Indonesia, 2018). Waktu peralihan berbeda antarrumah tangga. INF-02 merangkum keadaan kebunnya: "Kalau untuk petani, petani PIR, tapi karena sudah macet ya" (INF-02, wawancara, 11 Juli 2026). INF-01 baru beralih setelah pandemi COVID-19 memukul usaha sawit dan mebelnya sekaligus; ia kini menanam jagung dan kacang tanah di lahan bekas sawit seluas sekitar 2 hektare, sebagian milik adiknya yang ia garap. INF-02 kini mengelola kebun pinang sekitar tiga perempat hektare, dan INF-03 menanam pisang, rambutan, dan pinang di lahan pangan seluas tiga perempat hektare. Dengan demikian, arah komoditas bercabang: satu informan ke tanaman semusim untuk dijual, dua informan ke tanaman tahunan rakyat di lahan pangan. Observasi lapangan menemukan bekas kebun sawit yang telah dibuka menjadi kebun palawija dan lahan berpagar dengan pondok kerja, sementara beberapa batang sawit tua masih berdiri di sekelilingnya (Gambar 2).

Tabel 4 merangkum perubahan menurut enam dimensi dan menautkan setiap sel dengan sumber buktinya. Dimensi lahan menunjukkan perubahan paling tajam: dari jatah negara menjadi lahan plasma, lalu menjadi lahan rumah tangga yang dapat digarap kerabat, digarap teman, atau dipalang. Dimensi komoditas bercabang: INF-01 beralih ke tanaman semusim untuk pembeli lokal, sedangkan INF-02 dan INF-03 beralih ke tanaman tahunan rakyat, dan peserta W5 menyebut warga yang menanam seadanya di lahan pangan untuk menunjang hidup. Dimensi teknologi bergerak dari alat tangan ke alat mekanis pada INF-01, tetapi tidak pada semua petani. Pada dimensi tenaga kerja, INF-01 menuturkan bahwa kebanyakan petani yang kebun sawitnya tidak lagi berproduksi beralih menjadi tukang bangunan, dan enam dari tujuh informan kini memadukan usaha tani dengan pekerjaan lain. Dimensi pemasaran berubah dari ketergantungan pada pabrik menjadi relasi dengan pembeli lokal; INF-01 memasarkan hasil lewat Facebook dengan memotret dan menuliskan dagangannya, sementara W5 menyebut harga, angkutan, jalan kebun, dan daya beli sebagai kendala. Dimensi kelembagaan bergeser dari kelembagaan PIR ke kelompok tani; di PIR I terdapat tiga sampai empat kelompok yang pernah menerima bantuan, antara lain ternak sapi (W5). Dimensi tenaga kerja dan kelembagaan tetap paling tipis datanya, sehingga uraiannya dibatasi pada keterangan di atas.

Tabel 4. Perubahan Pola Bertani Menurut Fase dan Dimensi, dengan Sumber Bukti

Dimensi	Fase pangan	Fase sawit	Fase diversifikasi
Lahan dan penguasaan	Jatah lahan pekarangan dan lahan pangan; lahan pangan diolah sebelum sawit berbuah (INF-01, INF-02)	Lahan usaha I khusus sawit, lahan usaha II untuk pangan (W5; dokumen)	Bekas kebun sawit ditanami palawija, termasuk lahan kerabat yang digarap; sebagian lahan digarap teman yang tidak memiliki lahan (INF-01); lahan yang digarap INF-03 kini berstatus milik keluarga; sebagian bidang dipalang pemilik ulayat (INF-02, W5)
Komoditas dan orientasi produksi	Padi, kacang-kacangan, singkong untuk konsumsi; kakao dari penyuluh pada sedikitnya satu petani Papua (INF-01, W5)	Tandan buah segar sawit untuk pabrik (dokumen); pendapatan bulanan (W5)	Bercabang: jagung dan kacang tanah untuk pembeli lokal (INF-01); pinang, pisang, dan rambutan di lahan pangan (INF-02, INF-03); tanaman seadanya untuk menunjang hidup (W5)
Teknologi dan input	Benih sendiri dan bantuan, alat tangan (cangkul), cara tanam daerah asal atau cara kampung (INF-01, INF-02, W5)	Rincian paket teknologi sawit tidak tergali dalam wawancara	Traktor tangan untuk parit, alat tanam mekanis, alat perontok, pemupukan dan penyemprotan pada INF-01; sebagian petani Papua tetap tanpa pupuk (W5)
Tenaga kerja dan organisasi produksi	Kerja harian sebagai sampingan (INF-01); jatah hidup sampai sawit berbuah (INF-02)	Usaha sampingan seperti mebel (INF-01)	Peralihan ke kerja bangunan menurut INF-01; buruh (INF-03); usaha tani dipadukan dengan kerja lain (6 dari 7 informan)
Pemasaran dan rantai nilai	Data tidak tersedia	TBS dijual ke pabrik dalam sistem inti-plasma (dokumen)	Pembeli lokal datang ke kebun, promosi lewat Facebook (INF-01); kendala harga, angkutan, jalan kebun, dan daya beli (W5)
Kelembagaan dan relasi sosial	Penyuluh dan bantuan pemerintah (INF-02, W5)	Kelembagaan PIR; keberatan atas pelepasan tanah tidak disuarakan terbuka pada masa Orde Baru menurut W5	Kelompok tani dan bantuan ternak (W5); tuntutan ulayat dan pemalangan (INF-02, W5); belajar bersama antara transmigran dan petani Papua (INF-01, W5)

Sumber: Analisis data primer, 2026. W5: wawancara kelompok petani Papua PIR I.



Gambar 2. Bekas Kebun Sawit yang Dialihkan Menjadi Lahan Pertanian di Kawasan PIR I, Distrik Arso: (a) Kebun Palawija, (b) Lahan Berpagar dengan Pondok Kerja
Sumber: Dokumentasi penelitian, Juli 2026

Perubahan teknologi juga memperlihatkan siapa yang mampu mengadopsi. INF-01 memakai traktor tangan untuk membuat parit, alat tanam mekanis karena tanam manual dinilai lambat, alat perontok jagung, dan alat untuk menaburkan pupuk ke tanah. Ia juga mempersilakan teman yang tidak memiliki lahan menggarap sebagian lahan yang ia kelola dan mengambil hasilnya. Sebaliknya, peserta W5 menyatakan bahwa sebagian warga Papua mengikuti cara kerja penyuluh dan petani transmigran, tetapi warga lain masih bertani secara tradisional tanpa pupuk di lahan pangan; W5 tidak menyebut berapa banyak warga pada masing-masing kelompok. Indikasi ketimpangan adopsi ini bersumber dari dua jenis keterangan yang saling menguatkan, tetapi belum dapat diukur besarannya.

PP2: Faktor Pendorong dan Kedudukannya

Faktor yang muncul dari data dikelompokkan menurut jenisnya menurut kedudukannya dalam tuturan informan dan dokumen (Tabel 5). Faktor struktural adalah tekanan yang berada di luar kendali rumah tangga dan menjadi pemicu: penuaan tanaman sawit dan program peremajaan

yang belum menjangkau seluruh kebun, harga TBS dan akses pabrik, serta kenaikan biaya input; yang terakhir ini baru berupa indikasi dari INF-01. Pandemi COVID-19 dicatat sebagai guncangan yang mempercepat peralihan, juga baru berupa indikasi dari satu rumah tangga. Faktor rumah tangga adalah pertimbangan yang menentukan arah respons, terutama biaya sekolah anak. INF-01 menautkan keputusannya dengan tanggungan anak sekolah dan dengan membaca pasar: "jagung sedang bagus, kita tanam jagung" (INF-01, wawancara, 11 Juli 2026). Faktor pendukung adalah kondisi yang memungkinkan respons berhasil, yaitu jalan, pembeli lokal, media sosial, pengalaman bertani, dan bantuan kelompok tani. Banjir muncul sebagai faktor penghambat lokal; INF-02 menyebut kampungnya rawan banjir sehingga hanya kelapa yang bertahan, sedangkan tanaman lain rusak.

Dokumen menguatkan kedudukan faktor struktural. Kajian PIR V Arso mengidentifikasi keterbatasan infrastruktur, lemahnya manajemen, biaya perawatan yang tinggi, harga sawit yang berfluktuasi, dan ketiadaan fasilitas pengolahan sebagai penyebab kemunduran program (Isnaini dkk., 2025). Pemberitaan tahun 2021 mencatat bahwa operasi PTPN II di Arso sudah tidak berjalan dan kontrak plasma telah berakhir, sedangkan hibah peremajaan dari BPDPKS sebesar Rp30 juta per hektare jauh di bawah kebutuhan sekitar Rp75 juta per hektare, sehingga petani harus menutup sisanya dengan pinjaman bank (Mongabay Indonesia, 2021). Kondisi ini membantu menjelaskan mengapa peralihan ke tanaman semusim, yang modalnya lebih kecil dan hasilnya lebih cepat, menjadi pilihan rumah tangga seperti INF-01, sementara warga lain tetap menunggu peremajaan.

Tabel 5. Faktor Perubahan Menurut Jenis, Kedudukan, dan Sumber Bukti

Faktor	Jenis	Kedudukan	Sumber bukti
Penuaan sawit dan peremajaan yang belum tuntas	Struktural	Pemicu utama	INF-02, W5; Isnaini dkk. (2025); Mongabay Indonesia (2021)
Harga TBS, akses pabrik, dan beban kredit plasma	Struktural	Pemicu	Isnaini dkk. (2025); Mongabay Indonesia (2021)
Kenaikan biaya pupuk dan input	Struktural	Pemicu (indikasi)	INF-01
Pandemi COVID-19	Guncangan	Pemercepat (indikasi)	INF-01
Biaya sekolah dan kebutuhan rumah tangga	Rumah tangga	Penentu arah respons	INF-01
Jalan, pembeli lokal, dan media sosial	Pendukung	Pemungkin	INF-01; observasi
Bantuan pemerintah dan kelompok tani	Pendukung	Pemungkin, tidak merata	INF-02, W5
Banjir dan jalan kebun yang rusak	Penghambat	Membatasi pilihan tanaman	INF-02, W5

Sumber: Analisis data primer dan dokumen, 2026

Program pemerintah yang disebut informan perlu dirinci karena tidak seragam. Pada fase awal, program berupa jatah hidup, alat pertanian, dan bibit dari penyuluh, termasuk bibit kakao bagi petani Papua yang bertutur dalam W5. Pada fase sekarang, bantuan yang disebut berupa bantuan kelompok tani, termasuk ternak sapi, serta perbaikan jalan dan rumah melalui program kampung (INF-02, W5). Informan tidak menyebut nama program, instansi, dan tahunnya secara pasti, sehingga artikel ini tidak menautkan bantuan tersebut pada program tertentu. INF-02 menyebut pendampingan, bantuan budidaya, dan penyediaan pasar sebagai kebutuhan petani: "kalau tidak ada pasar kan juga siapa juga mau pergi tanam" (INF-02, wawancara, 11 Juli 2026).

PP3: Strategi Nafkah dan Relasi dengan Masyarakat Adat

Tabel 6 menyajikan strategi nafkah menurut kelompok dengan memakai unsur kerangka Scoones (1998): konteks kerentanan, aset, strategi, dan capaian. Pemilahan ini memperlihatkan bahwa respons terhadap menurunnya sawit tidak sama. INF-01, transmigran PIR dengan modal dan pengalaman, beralih ke palawija dengan alat mekanis dan memperluas garapan melalui lahan kerabat, tetapi menilai pendapatannya kini hanya cukup untuk kebutuhan makan dan tidak lagi memungkinkan pulang kampung. Petani Papua PIR I menempuh strategi yang lebih beragam: aparat kampung dengan kebun pinang (INF-02), buruh dengan kebun pangan (INF-03), dan peserta W5 yang tetap berharap sawit dihidupkan kembali. Harapan yang sama juga disampaikan INF-01, yang ingin kembali menanam sawit atau memadukannya dengan tanaman lain demi masa

depan anak-anaknya. Perbedaan antargenerasi hanya dapat disentuh secara terbatas: INF-01 dan INF-02 (generasi pertama) tetap bertumpu pada kebun, sedangkan INF-03 (generasi kedua) menggabungkan kebun pangan dengan kerja buruh. Informan di Skanto dan Arsopura (INF-04 sampai INF-07) seluruhnya memadukan usaha tani dengan kerja sebagai aparat atau pekerja swasta, dan dua di antaranya (INF-04 dan INF-05) masih mempertahankan kebun sawit.

Tabel 6. Matriks Strategi Nafkah Menurut Kelompok

Unsur	Transmigran PIR (INF-01)	Petani Papua PIR (INF-02, INF-03, W5)	Kawasan Skanto (INF-04 s.d. INF-07)
Konteks kerentanan	Sawit tua, COVID-19, harga input	Sawit tua, banjir, tuntutan ulayat atas lahan	Data terbatas
Aset utama	Lahan 2 ha (sebagian milik kerabat), alat mekanis, pengalaman	Lahan bekas plasma dan lahan pangan sekitar 0,75 ha yang kini dikuasai rumah tangga	Lahan usaha tani; dua informan masih memiliki kebun sawit
Strategi	Intensifikasi palawija, garap lahan kerabat, pemasaran daring	Pinang dan kebun pangan, kerja aparat dan buruh	Usaha tani dipadukan dengan kerja aparat atau swasta
Capaian menurut informan	Cukup untuk makan, tidak lagi pulang kampung	Ekonomi dinilai sulit; berharap sawit kembali	Belum dapat dinilai

Sumber: Analisis data primer, 2026

Relasi antarkelompok perlu dibedakan antara relasi transmigran dengan petani Papua sesama peserta PIR dan relasi para peserta PIR dengan pemilik hak ulayat. Pada relasi pertama, INF-01 menilai hubungannya dengan petani Papua di sekitarnya baik karena "saling sama-sama belajar"; ia mengajari tetangganya membuat parit untuk lahan yang tergenang dan mencoba alat bersama (INF-01, wawancara, 11 Juli 2026). Peserta W5 juga menyebut hubungan dengan transmigran baik, tetapi menilai sumbangan transmigran dalam pertanian biasa saja karena pengetahuan bertani lebih banyak diperoleh dari penyuluhan dinas. Penilaian yang berbeda ini menunjukkan bahwa arus pengetahuan tidak sepenuhnya dipersepsikan sama oleh kedua kelompok.

Pada relasi kedua, yang menyangkut lahan, keterangan informan menunjuk pada tiga hal. Pertama, mekanismenya adalah penyerahan tanah adat untuk pembangunan kawasan transmigrasi dan perkebunan pada masa awal, yang menurut peserta W5 disertai pembayaran yang tidak sesuai. Kedua, tuntutan ulayat baru disuarakan terbuka setelah Reformasi; menurut W5, pada masa Orde Baru keberatan tidak dapat disampaikan karena situasi politik pada masa itu. Ketiga, tuntutan itu kini berwujud pemalangan sebagian bidang, larangan menanam di bidang tertentu sebelum persoalan diselesaikan, dan tuntutan kompensasi yang menurut INF-02 pernah mencapai triliunan rupiah. Peserta W5, yang merupakan petani Papua peserta PIR dan bukan pemilik ulayat atas lahan tersebut, memandang tuntutan itu wajar:

> "Pembayaran kan tidak sesuai. Jadi memang wajarlah kalau masyarakat adat, masyarakat asli menuntut." (W5, 11 Juli 2026)

INF-02 menilai pemerintah daerah belum serius menangani persoalan ini sehingga penyelesaian dibiarkan antara warga dan pemilik tanah. Dokumentasi sekunder memperlihatkan perspektif pihak lain. Menurut pemberitaan yang merujuk dokumen pelepasan, sebagian pemilik ulayat menyatakan bahwa luas yang disepakati secara lisan hanya sekitar 500 hektare untuk pembibitan, sedangkan dokumen pelepasan mencakup 50.000 hektare; mereka menuntut kompensasi atas penggunaan lahan, pengembalian hak, dan pengakuan sebagai pihak pertama dalam kesepakatan baru. Pemerintah Kabupaten Keerom menyatakan bahwa sebagian lahan telah beralih kepada investor lain serta dipakai untuk permukiman dan kawasan hutan, dan merekomendasikan peninjauan izin dan pemetaan konsesi, sedangkan Pemerintah Provinsi Papua membentuk tim penyelesaian (Mongabay Indonesia, 2018). Kasus di Kampung Workwana dan Arso Kota juga tercatat dalam Inkuiri Nasional Komnas HAM 2015 (Tanahkita, t.t.). Pernyataan langsung PTPN II tidak ditemukan dalam dokumen yang ditelaah. Luas bidang yang dipersoalkan tidak dapat dipastikan dari data penelitian ini, dan pemilik hak ulayat belum diwawancarai secara langsung, sehingga perspektif mereka disajikan melalui tuturan informan dan dokumen.

Pola bertani masyarakat adat sendiri berubah dengan derajat yang berbeda. Menurut INF-06 di Arsopura, sebelum kawasan transmigrasi berkembang kebun dikelola dengan perladangan berotasi di dalam wilayah marga, dengan ubi-ubian, pisang, dan keladi sebagai tanaman utama, dan

pembukaan kebun memerlukan persetujuan pemegang hak marga. Keterangan ini hanya didukung satu informan dan karena itu tidak digeneralisasi ke seluruh marga atau kampung. Di PIR I, petani Papua tidak hanya meniru teknik transmigran; mereka sejak awal menjadi peserta plasma sawit, dan peserta W5 menginginkan sawit kembali sebagai komoditas utama: "Sawit datang lagi, karena itu kita punya hidup" (W5, 11 Juli 2026).

PEMBAHASAN

Tabel 7 merangkum keterkaitan setiap pertanyaan penelitian dengan data yang dipakai dan temuan utamanya, sekaligus menandai kekuatan buktinya. Pembahasan berikut menafsirkan temuan tersebut dengan kerangka konseptual dan membandingkannya dengan kajian lain.

Tabel 7. Keterkaitan Pertanyaan Penelitian, Data, dan Temuan

PP	Data utama	Temuan utama	Kekuatan bukti
PP1	INF-01, INF-02, INF-03, W5; dokumen; observasi	Tiga fase tumpang tindih; lahan dan komoditas berubah paling tajam; arah komoditas bercabang	Temuan untuk PIR I; terbatas untuk kawasan lain
PP2	INF-01, INF-02, W5; Isnaini dkk. (2025); dokumentasi PSR	Pemicu struktural (penuaan sawit, peremajaan, harga TBS); kebutuhan rumah tangga menentukan arah; banjir sebagai penghambat	Temuan; biaya input dan COVID-19 masih indikasi
PP3	INF-01, INF-02, INF-03, W5; dokumen sengketa ulayat	Strategi nafkah berbeda per kelompok; tanda awal diferensiasi; kerja sama antarpeserta PIR dan tuntutan ulayat yang belum selesai	Temuan untuk PIR I; perspektif pemilik ulayat melalui dokumen

Sumber: Analisis penulis, 2026

LINTASAN NON-LINIER DAN BERLAPIS

Dengan definisi operasional pada Kerangka Konseptual, data mendukung istilah non-linier tetapi tidak mendukung istilah siklis. Dimensi komoditas tidak bergerak satu arah: pada INF-01 berbalik dari tanaman tahunan ke tanaman semusim, sedangkan pada INF-02 dan INF-03 bercabang ke tanaman tahunan rakyat di lahan pangan. Lima dimensi lain juga tidak kembali ke keadaan fase pangan: lahan kini dikuasai rumah tangga dan dapat digarap kerabat, sebagian hasil dijual kepada pembeli lokal, INF-01 memakai alat mekanis, tenaga kerja terbagi dengan kerja nonpertanian, dan kelembagaan PIR digantikan kelompok tani serta relasi pasar. Fase sawit juga meninggalkan lapisan yang membentuk fase sesudahnya, yaitu lahan bekas plasma yang kini dikuasai rumah tangga, batang sawit tua di tepi kebun, dan ingatan akan masa petani berdasi yang mendorong INF-01 dan peserta W5 menginginkan sawit kembali. Temuan ini lebih dekat dengan kajian yang menolak tesis transisi agraria satu arah, misalnya gejala bertahannya petani kecil di Asia Tenggara (Rigg dkk., 2016) dan transformasi ekonomi tanpa transformasi agraria di Vietnam (Nguyen dkk., 2020). Temuan juga sejalan dengan bukti panel bahwa rumah tangga petani perkebunan di Indonesia aktif berpindah strategi ketika harga dan iklim berubah (Kühling dkk., 2022). Perbedaannya, di Keerom perpindahan itu terjadi bukan antara karet dan sawit, melainkan dari sawit ke berbagai tanaman di lahan warisan PIR, sehingga status dan pembagian lahan warisan program menjadi penentu.

MENGUJI BERNSTEIN: TANDA AWAL DIFERENSIASI

Pertanyaan Bernstein (2010) tentang siapa menguasai apa dan siapa mengerjakan apa membantu membaca perbedaan respons dalam Tabel 6. Petani dengan modal, alat, dan akses lahan kerabat dapat mengintensifkan usaha tani, sedangkan bekas petani plasma yang tidak memiliki modal, menurut INF-01 dan contoh INF-03, menjadi tukang bangunan atau buruh. Kajian di Sumatra menunjukkan bahwa sawit dapat membelah petani kecil menjadi segelintir petani kapitalis dan banyak petani yang harus menjual tenaga (Habibi, 2023). Data penelitian ini belum cukup untuk menyatakan pembentukan kelas seperti itu, karena tidak ada data upah, sewa, atau akumulasi lahan. Yang dapat dinyatakan adalah tanda awal diferensiasi: akses pada lahan kerabat dan alat mekanis mulai membedakan kemampuan rumah tangga merespons menurunnya sawit. Ini memperluas temuan bahwa petani eks PIR memiliki aset lebih baik daripada petani plasma dan mandiri (Anas dkk., 2025), dengan menunjukkan bahwa keunggulan itu tidak merata di dalam kelompok eks PIR sendiri dan berubah seiring umur kebun.

MENGUJI SCOONES: KERENTANAN DAN KELEMBAGAAN

Dalam kerangka Scoones (1998), konteks kerentanan di Keerom terdiri atas tren jangka panjang (penuaan sawit), guncangan (COVID-19, banjir), dan musiman (harga). Proses kelembagaan berperan ganda: PIR membangun aset awal yang kuat, tetapi ketika kebun menua, kelembagaan pengganti berupa kelompok tani dan bantuan program belum cukup menopang peralihan. Capaian nafkah menurut informan pun lebih rendah daripada masa sawit. Temuan ini berbeda dengan kesimpulan bahwa petani eks transmigrasi termasuk kelompok paling tangguh (Hendrawan dkk., 2024). Perbedaan itu tidak dapat diuji langsung karena penelitian ini tidak mengukur ketangguhan, tetapi data menunjukkan bahwa ketangguhan yang dibangun program dapat melemah ketika dukungan kelembagaan tidak diperbarui bersamaan dengan siklus hidup tanaman. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa petani sawit kecil di Indonesia memerlukan dukungan yang lebih kuat atas lahan, modal, dan sarana yang mereka butuhkan (Li, 2024).

PEMBELAJARAN SOSIAL DAN RELASI ANTARKELOMPOK

Penyebaran teknik di PIR I berlangsung melalui penyuluh dan relasi bertetangga, sejalan dengan teori difusi yang menekankan peran jaringan antarpetani (Rogers, 2003) dan kajian tentang posisi transmigran dalam jaringan pengetahuan pedesaan (Pratiwi dkk., 2022). Namun penilaian yang berbeda antara INF-01 dan peserta W5 tentang siapa belajar dari siapa menunjukkan bahwa difusi tidak netral; arus pengetahuan dipersepsikan berbeda oleh kedua kelompok. Temuan bahwa petani Papua di PIR I adalah peserta plasma sejak awal juga mengoreksi gambaran bahwa Orang Asli Papua hanya berubah melalui peniruan teknik transmigran. Mereka terlibat dalam sawit dengan syarat yang sama dengan transmigran, sementara tuntutan pemilik ulayat atas lahan kawasan, yang mereka pandang wajar, belum selesai. Keadaan ini menunjukkan bahwa kategori Orang Asli Papua di kawasan transmigrasi tidak tunggal: ada peserta plasma, ada pemilik ulayat, dan keduanya dapat beririsan dalam relasi kekerabatan. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa hasil keterlibatan dalam sawit ditentukan oleh syarat-syarat keterlibatan, bukan sekadar oleh terlibat atau tidaknya (McCarthy, 2010), dan dengan temuan di perbatasan Kalimantan bahwa kelompok adat dan transmigran menanggapi perkebunan secara berbeda menurut relasi sosialnya (Carlson dkk., 2026). Kajian konflik agraria di kawasan lain menunjukkan bahwa sengketa semacam ini dapat berlangsung puluhan tahun (Wiratno dkk., 2026); tuntutan di Arso, yang berakar pada pelepasan tanah 1982 dan disuarakan terbuka sejak Reformasi, memperlihatkan rentang waktu serupa. Untuk konteks pertanian Orang Asli Papua, keterangan INF-06 tentang perladangan berotasi sejalan dengan kajian yang mencatat kebun berukuran 0,25-1 hektare yang dirotasi setiap dua sampai tiga tahun tanpa pupuk dan pestisida (Turua dkk., 2014).

KERANGKA ENAM DIMENSI SEBAGAI ALAT

Penerapan kerangka pada data memperlihatkan kegunaan sekaligus batasnya. Kegunaannya, kerangka memaksa analisis melihat dimensi yang mudah terlewat bila perubahan dibaca sebagai pergantian komoditas, terutama status lahan dan kelembagaan. Batasnya, dua dimensi (tenaga kerja dan kelembagaan) membutuhkan data kuantitatif dan informan dari perusahaan inti, koperasi, dan dinas yang belum tersedia. Kerangka ini karena itu ditawarkan sebagai alat analisis yang perlu diuji ulang, bukan sebagai temuan teoretis yang sudah mapan.

KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki lima keterbatasan. Pertama, jumlah informan tujuh orang, dengan keterangan paling padat berasal dari PIR I; kawasan transmigrasi umum dan pemilik hak ulayat di luar PIR I belum terwakili secara memadai, demikian pula perempuan, penyuluh, dinas teknis, dan perusahaan inti. Kedua, pengumpulan data berlangsung dalam satu musim lapangan pada Juli 2026, sehingga variasi musiman tidak tertangkap. Ketiga, rekonstruksi fase bersifat retrospektif dan rentan terhadap bias ingatan, terutama untuk tahun, harga, dan hasil panen. Keempat, penelitian tidak mengumpulkan data kuantitatif pendapatan dan produksi rumah tangga, sehingga perbandingan antara kampung yang dekat dan jauh dari pasar, serta antargenerasi, belum dapat dibuat. Kelima, risiko teknologi seperti residu pestisida, kesehatan petani, dan kesuburan tanah tidak ditanyakan secara khusus dan tidak muncul dalam tuturan informan, sehingga tidak dibahas di sini. Karena keterbatasan tersebut, temuan diperlakukan sebagai temuan eksploratif yang perlu diuji pada penelitian lanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menjawab PP1, pola bertani masyarakat transmigrasi di Arso dan Skanto berubah melalui tiga fase yang saling tumpang tindih: tanaman pangan sebagai penyangga masa tunggu sawit, dominasi sawit yang diingat sebagai masa paling sejahtera, dan diversifikasi ke palawija, hortikultura, dan tanaman tahunan rakyat setelah hasil sawit menurun, mulai sekitar 2012 menurut catatan lapangan dan baru setelah COVID-19 pada sebagian rumah tangga. Perubahan paling tajam terjadi pada dimensi lahan dan komoditas, sedangkan dimensi tenaga kerja dan kelembagaan berubah tetapi datanya paling terbatas. Lintasannya non-linier dan berlapis, bukan kembali ke titik awal. Menjawab PP2, pemicu utama perubahan bersifat struktural, yaitu penuaan sawit, peremajaan yang belum tuntas, dan harga TBS, dengan kenaikan biaya input dan guncangan COVID-19 sebagai indikasi dari satu rumah tangga; kebutuhan rumah tangga menentukan arah respons; sedangkan jalan, pembeli lokal, dan kelompok tani menjadi pemungkin, dengan banjir sebagai penghambat lokal. Menjawab PP3, perubahan tersebut menghasilkan strategi nafkah yang berbeda antara transmigran dan petani Papua serta antara rumah tangga yang memiliki modal dan yang tidak, dengan tanda awal diferensiasi. Relasi antarkelompok memiliki dua sisi: kerja sama dan saling belajar antara transmigran dan petani Papua peserta PIR, serta tuntutan pemilik ulayat yang belum selesai atas lahan kawasan. Secara konseptual, kerangka enam dimensi terbukti berguna untuk menunjukkan bahwa perubahan komoditas disertai perubahan status lahan dan kelembagaan, tetapi masih perlu diuji dengan data tenaga kerja dan kelembagaan yang lebih lengkap.

Pemerintah Kabupaten Keerom dan dinas teknis disarankan menata ulang dukungan bagi petani eks PIR sesuai pilihan komoditasnya, baik melalui peremajaan sawit maupun penguatan palawija, hortikultura, dan tanaman tahunan rakyat; menyediakan pendampingan dan akses pasar sebagaimana diminta informan; menangani drainase di kampung rawan banjir; serta memfasilitasi penyelesaian tuntutan ulayat secara terbuka dengan melibatkan pemilik ulayat, pemerintah kampung, dan perusahaan inti. Penelitian lanjutan disarankan memperluas informan ke kawasan transmigrasi umum, pemilik hak ulayat, perempuan, penyuluh, dan perusahaan inti; menggabungkan survei pendapatan rumah tangga dengan wawancara; membandingkan kampung yang dekat dan jauh dari pasar; menilai risiko pestisida dan kesuburan tanah pada kebun bekas sawit; dan menelusuri arsip program PIR untuk memverifikasi periodisasi dan luas lahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih yang mendanai penelitian ini melalui skema PNBP Tahun Anggaran 2026, serta kepada para informan, Pemerintah Distrik Arso dan Distrik Skanto, serta pemerintah Kampung PIR I, Kampung Skanto, dan Kampung Arsopura atas dukungan selama pengumpulan data. Penulis juga berterima kasih kepada dua penelaah anonim atas masukan yang memperbaiki naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin, L. (2020). Identification of social dynamic of the economic smallholders of palm oil plantation on Keerom District of Papua. *Agricultural Science Digest*, *40*(2), 154-158. https://doi.org/10.18805/ag.D-179

Anas, K., Naping, H., Salman, D., & Tenriawaru, A. N. (2025). Differences in assets, strategies, and livelihood outcomes among oil palm smallholder typologies in West Sulawesi, Indonesia. *Sustainability*, *17*(13), 6064. https://doi.org/10.3390/su17136064

Badan Pusat Statistik Kabupaten Keerom. (2025). *Kabupaten Keerom dalam angka 2025* (Katalog 1102001.9420). BPS Kabupaten Keerom.

Bernstein, H. (2010). *Class dynamics of agrarian change*. Fernwood Publishing.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Carlson, K. M., Atem, A., Dean, J., Octifanny, Y., Seruni, A. P., & Syarifudin. (2026). Long-standing labour migration, new plantation enclosures, and social reproduction in Indonesian Borneo's borderlands. *Globalizations*, *23*(2), 237-261. https://doi.org/10.1080/14747731.2025.2553925

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Guest, G., Bunce, A., & Johnson, L. (2006). How many interviews are enough? An experiment with data saturation and variability. *Field Methods*, *18*(1), 59-82. https://doi.org/10.1177/1525822X05279903

Habibi, M. (2023). Extracting labour from the neighbour: Class dynamics of agrarian change in Sumatran oil palm. *The Journal of Peasant Studies*, *50*(4), 1317-1346. https://doi.org/10.1080/03066150.2022.2026330

Hendrawan, D., Chrisendo, D., & Musshoff, O. (2024). Strengthening oil palm smallholder farmers' resilience to future industrial challenges. *Scientific Reports*, *14*(1), 12105. https://doi.org/10.1038/s41598-024-62426-z

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang Dikaitkan dengan Program Transmigrasi. (1986).

Isnaini, R. A., Rahmawati, R., Yusuf, M., Zulihi, Z., Efendy, D., & Muhandy, R. S. (2025). Kajian sosiologi terhadap implementasi program perkebunan inti rakyat (PIR) V Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, *10*(1), 1-14. https://journal.unas.ac.id/populis/article/view/4013

Kühling, M., Alamsyah, Z., & Sibhatu, K. T. (2022). Agrarian change, livelihood dynamics and welfare outcomes: Evidence from plantation crop farmers in Indonesia. *Journal of Environmental Management*, *311*, 114864. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114864

Legiani, W. H., Lestari, R. Y., & Haryono. (2018). Transmigrasi dan pembangunan di Indonesia (studi deskriptif sosiologi kependudukan dan pembangunan). *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, *4*(1), 25-38. https://doi.org/10.30870/hermeneutika.v4i1.4820

Li, T. M. (2024). Securing oil palm smallholder livelihoods without more deforestation in Indonesia. *Nature Sustainability*, *7*(4), 387-393. https://doi.org/10.1038/s41893-024-01279-w

Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Sample size in qualitative interview studies: Guided by information power. *Qualitative Health Research*, *26*(13), 1753-1760. https://doi.org/10.1177/1049732315617444

McCarthy, J. F. (2010). Processes of inclusion and adverse incorporation: Oil palm and agrarian change in Sumatra, Indonesia. *The Journal of Peasant Studies*, *37*(4), 821-850. https://doi.org/10.1080/03066150.2010.512460

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Mongabay Indonesia. (2018, 12 Maret). *Kala masyarakat tuntut hak ulayat dari perusahaan sawit negara di Keerom (Bagian 1)*. https://www.mongabay.co.id/2018/03/12/kala-masyarakat-tuntut-hak-ulayat-dari-perusahaan-sawit-negara-di-keerom-bagian-1/

Mongabay Indonesia. (2021, 6 Mei). *Kala petani di Arso mulai remajakan kebun sawit (1)*. https://www.mongabay.co.id/2021/05/06/kala-petani-di-arso-mulai-remajakan-kebun-sawit-1/

Nguyen, T. A., Gillen, J., & Rigg, J. (2020). Economic transition without agrarian transformation: The pivotal place of smallholder rice farming in Vietnam's modernisation. *Journal of Rural Studies*, *74*, 86-95. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.12.008

Pratiwi, A., Matous, P., & Martinus, K. (2022). Transmigration programs and migrant positions in rural community knowledge networks. *Journal of Rural Studies*, *95*, 391-401. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.09.019

Rigg, J., Salamanca, A., & Thompson, E. C. (2016). The puzzle of East and Southeast Asia's persistent smallholder. *Journal of Rural Studies*, *43*, 118-133. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.11.003

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of innovations* (5th ed.). Free Press.

Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis* (IDS Working Paper No. 72). Institute of Development Studies.

Siriwa, S., Silo, A., Tebay, V., & Torobi, R. J. (2024). Pertumbuhan ekonomi masyarakat adat di wilayah perkebunan kelapa sawit Kabupaten Keerom. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, *12*(2), 139-148. https://doi.org/10.31957/jeb.v12i2.4141

Tanahkita. (t.t.). *Mama dan susu su hilang: Perjuangan masyarakat adat Daiget Keerom* [Basis data konflik]. Diakses 21 Oktober 2026, dari https://tanahkita.id/data/konflik/detil/aGQ2cVdIRTE3azA

Tulis, R. S., Pramusinto, A., Subarsono, A., & Kusumasari, B. (2025). Transmigration in Indonesia: A systematic review of policy direction, socio-ecological impacts, and implications for village administration (1959-2025). *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, *16*(2), 187-201. https://doi.org/10.23960/administratio.v16i2.529

Turua, U., Hadi, S., Juanda, B., & Murniningtyas, E. (2014). Ekologi dan budaya petani asli Papua dalam usahatani di Kabupaten Keerom. *Sosiohumaniora*, *16*(3), 234-241.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245.

Widyatmoko, B., & Dewi, R. (2019). Dynamics of transmigration policy as supporting policy of palm oil plantation development in Indonesia. *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, *9*(1), 35-55. https://doi.org/10.14203/jissh.v9i1.139

Wiratno, M. H., Kurniawan, R. C., & Mukhlis, M. (2026). Konflik agraria pada kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji dalam perspektif relasi otoritas. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, *5*(4), 2210-2222. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.3074